



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJ)
TAHUN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
KABUPATEN ASMAT
Jl. Frans Kaisepo**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, hanya berkat dan perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat Tahun 2023 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Asmat, 9 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN
ASMAT



MARGARETHA WABISER, SE
PEMBINA

NIP. 19780604 200502 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	10
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	11
1.2.2 Anggaran	12
1.3 Dasar Hukum	13
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	14
 BAB II Perencanaan Kinerja	
1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	21
1.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	24
1.3 Perjanjian Kinerja 2024	28
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.1.1. Skala Capaian Kinerja	34
3.1.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan.....	35
3.1.3. Membandingkan Antara Realisas dan beberapa tahun terakhir	38
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumentasi Perencanaan Strategis Organisasi	39
3.1.5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Menengah.....	40
3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	41
3.1.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
3.1.8. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun	

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	43
3.2 Realisasi Anggaran	51
BAB IV Penutup	43
DAFTAR LAMPIRAN :	
1. Rencana Aksi Dinas PPKB tahun 2024;	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;	
3. IKU 2024;	

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n
- Tabel 2.1** Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis
- Tabel 2.2** Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n
- Tabel 2.3** Rencana Kinerja Tahun n
- Tabel 2.4** Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah
- Tabel 2.5** Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n
- Tabel 2.6** Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah
- Tabel 2.7** Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n
- Tabel 3.1** Pengkategorian Capaian Kinerja
- Tabel 3.2** Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n
- Tabel 3.3** Perbandingan Capaian Kinerja
- Tabel 3.4** Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
- Tabel 3.5** Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
- Tabel 3.6** Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi
- Tabel 3.7** Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
- Tabel 3.8** Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
- Tabel 3.9** Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

- 2 Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat

daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana gambar berikut :

1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Asmat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

2.1.1. Tugas Pokok

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan

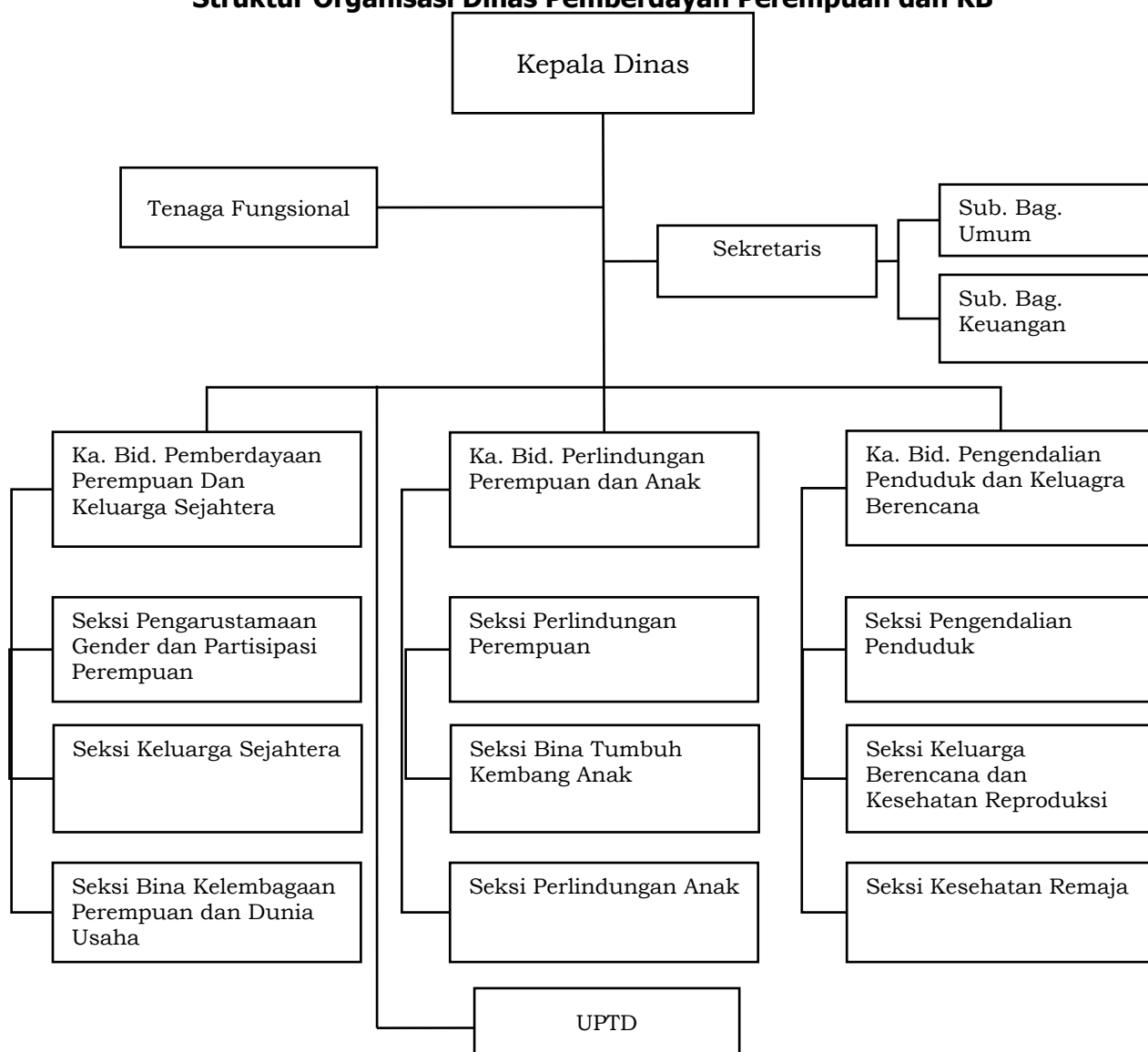
perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, terdapat struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pemberayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Berikut bagan struktur organisasi Dinas pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana .

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayan Perempuan dan KB



1.2.2 Anggaran

Berikut Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

Tabel 1.1

Pembandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp 14.966.249.075
APBD	Tahun n	Rp 14.704.821.719

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Bupati Asmat Nomor 107 Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Tahun
3. Renksi Tahun
4. Daftar Aset Tahun

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Meningkatnya Pekarustamaan Gender dan Juga Meningkatnya Penerapan Prinsip – Prinsip Good Goverment dan Clean Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

Tabel 2.1**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun 2021-2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Rasio KDRT	16	15	10	10	10
			Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tidak Kekerasan	10	10	10	10	10
			Indeks Pemberdayaan Gender	49,48	49,48	49,50	49,55	50,12
		Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	Rata-rata Anak Per Keluarga	15,50	20,15	25,40	30,12	35,50
			Rasio Akseptor KB	25	25	30	35	40
			Cakupan Peserta KB Aktif	6,261	6,261	7,156	7,861	8,180

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb Periode 2021 - 2025

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kk Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Seluruh	Rata - rata Anak per Keluarga	Orang	Rata - rata Anak Dalam satu Keluarga	Jumlah Anak yang dilahirkan per Keluarga	Aplikasi Sistim Infiriasi Keluarga (SIGA)
		Rasio Akseptor KB	Orang	Jumlah Perbandingan antara Peserta KB dengan Usia Pasangan subur	Pengukuran kuantitatif dari jumlah individu atau pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi atau keluarga berencana (KB)	Aplikasi Sistim Infiriasi Keluarga (SIGA)
		Cakupan Peserta KB	Orang	Cakupan Peserta KB Aktif yang memperoleh pelayanan	Jumlah peserta KB aktif dari setiap pasangan usia subur	Aplikasi Sistim Infiriasi Keluarga (SIGA)
		Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	Orang	Tingkat kemiskinan keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Bidang Pembedayaan Perempuan dan Keluarga

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Sejahtera
2	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Orang	Tingkat Partisipasi perempuan yang aktif melaksanakan Tugas di lembaga pemerintah baik yang ada di kampung, distrik atau pun di kota kabupaten.	Peningkatan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera
		Rasio KDRT	Kasus	Perbandingan atau pun pengukuran KDRT per kasus dengan 100.000 Orang.	Jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga	Aplikasi Simponi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
		Persentase Pekerja Usia Anak-anak	Orang	Persentase Pekerja anak yang ada di kabupaten Asmat	Peningkatan pekerja anak usia 5-14 tahun dan jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Orang	Jumlah Persentase Partisipasi Perempuan di dunia kerja	Prosedur penanganan pengaduan langsung	Bidang Perlindungan Perempuan dan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dibandingkan dengan jumlah partisipasi perempuan yang tidak bekerja	dan tidak langsung	Anak
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Orang	Jumlah Pegaduan perempuan atas tidak kekerasan yang ada di kabupaten Asmat Tahun 2024.	Penilaian Inspektorat atas laporan Kineja OPD	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
3	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	Laporan	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten.

Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Nomor 5 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kk Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Tahun 2024:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kk
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	Laporan	B
2	Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat	Rata - rata Anak per Keluarga	Orang	4 orang
			Rasio Akseptor KB	Orang	0,6 %
			Cakupan Peserta KB	Orang	56,89 %
			Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	%	8,54%
3	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Peningkatan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga	Orang	35,30%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pemerintah		
			Rasio KDRT	Kasus	20,57%
			Persentase Pekerja Usia Anak-anak	Orang	5,14%
			Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Orang	54,57%
			Kasus KDRT	Kasus	18,14%

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb tahun 2024.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kb tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kk
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Seluruh	Rata - rata Anak per Keluarga	4 orang
		Rasio Akseptor KB	0,6 %
		Cakupan Peserta KB	56,89 %
		Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	8,54%
2	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	35,30%
		Rasio KDRT	20,57%
		Persentase Pekerja Usia Anak-anak	5,14%
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,57%
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	18,14%
3	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	B

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kk Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

Tabel 2.5
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan
perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata - rata Anak per Keluarga	4 orang	330.268.000	DNF BOKB
	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota				
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	0,6 %	15.406.000	DNF BOKB
	Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota				
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jejarangnya				
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB	56,89 %	105.990.000	DNF BOKB
	Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota				

	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	8,54%	1.479.012.391	OTSUS
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga				
	Penyediaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanaan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR,BKB,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera)				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	35,30%	191.935.780	OTSUS
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota				
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	20,57%	191.935.780	OTSUS
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota				
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota				
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pekerja Usia Anak-anak	5,14%		DNF PPA

	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			142.675.000	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kwewnangan kabupaten kota				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,57%	191.935.780	OTSUS
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota				
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyelesaian an Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	18,14%	191.935.780	OTSUS
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota				
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	B 18,14%	26.496.120	DAU
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	Rata - rata Anak per Keluarga	4 orang	4 Orang	100%	Sangat tinggi	Seksi Pengendalian Penduduk
		Rasio Akseptor KB	0,6 %	0,5%	83,33%	Tinggi	Seksi Keluarga berencana
		Cakupan Peserta KB	56,89 %	51%	89,64%	Tinggi	Seksi Keluarga berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	8,54 %	0,26%	3,04%	Sangat Rendah	Seksi Keluarga Sejahtera
2	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	35,30 %	0,29%	0,82%	Sangat Rendah	Seksi Perlindungan Perempuan
		Rasio KDRT	20,57 %	0,1%	0,48%	Sangat Rendah	Seksi Perlindungan Perempuan
		Persentase Pekerja Usia Anak-anak	5,14 %	0,17%	3,30%	Sangat Rendah	Seksi Perlindungan Anak
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,57 %	0,24%	0,43%	Sangat Rendah	Seksi Perlindungan Perempuan
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan	18,14 %	0,2%	1,1%	Sangat Rendah	Seksi Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Anak dari Tindakan Kekerasan					
3	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	B	B	100%	Baik	Bagian Umum dan Keuangan

Sumber: Sumber dari realisasi keuangan dan capaian program pada bidang .

Uraian penjelasan tabel:

Pelaksanaan Sasaran Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sudah sesuai Indikator dan juga Target Pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Namun beberapa Indikator masih mempunyai realisasi kecil mengingat tidak semua lokus bisa terjangkau oleh program dinas pemberdayaan perempuan. Hal ini dikarenakan membangun sumber daya manusia butuh waktu yang lama ketimbang pembangunan fisik. Kegiatan yang ada pada dinas pemberdayaan perempuan lebih banyak membangun sumber daya manusia yang tentunya memakan waktu yang cukup lama mengenai pentingnya kesadaran masyarakat tentang ber-KB dan pentingnya pelaporan pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	Rata - rata Anak per Keluarga	4 Orang	4 Orang	4 orang	4 Orang	100%
		Rasio Akseptor KB	0,3%	0,4%	0,6 %	0,5%	83,33%
		Cakupan Peserta KB	50%	52%	56,89 %	51%	89,64%
		Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	0,30%	0,27%	8,54%	0,26%	3,04%
2	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	0,20%	0,25%	35,30%	0,29%	0,82%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ah					
		Rasio KDRT	0,2%	0,5%	20,57%	0,1%	0,48%
		Persentase Pekerja Usia Anak-anak	0,15%	0,10%	5,14%	0,17%	3,30%
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0,30%	0,15%	54,57%	0,24%	0,43%
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	0,4%	0,5%	18,14%	0,2%	1,1%
	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan	Nilai hasil evaluasi atas	B	B	B	B	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	yang Berorientasi pada pelayanan Prima	akuntabilitas kinerja pemerintah					

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana periode 2021-2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4/5*100)
1.	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	87.66%	50%	174%
		Nilai akuntabilitas kinerja OPD	B	B	B
2.	Peningkatan akses dan kualitas	Jumlah peserta KB aktif	51%	8,58%	594%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4/5*100)
	pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat	Jumlah akseptor aktif	0,5%	8,580%	5,8%
		Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)	0%	5	0
		Persentase Keluarga Prasejahtera	0,26%	35,50%	0,73%
		Rasio Akseptor KB	0,5%	40%	1,25%
3.	Peningkatan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	0%	50,12%	0
		Indeks Pemberdayaan Gender	0%	40,20%	0
		Kasus KDRT	0,1%	10	1%

Sumber : Dari Bagian Umum dan Keuangan Serta Bidang Pada DPPKB

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan antara Rencana Strategis dengan Realisasi kinerja Tahun 2024 Pada Masing-masing indikator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana belum mencapai maksimal, hal ini dikarenakan belum bisa menjangkau lokus diseluruh kampung yang ada di kabupaten Asmat dikarenakan keterbatasan Anggaran.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4/5*100)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	Rata - rata Anak per Keluarga	4 Orang	2,68	2,68
		Rasio Akseptor KB	0,5%	73,8	0,67
		Cakupan Peserta KB	51%	73,8	69,10
		Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	0,26%	0	0
2	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	0,29%	0	0
		Rasio KDRT	0,1%	50	0,2
		Persentase Pekerja Usia Anak-anak	0,17%	0	0
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0,24%	50	0,48
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan	0,2%	50%	0,4

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4/5*100)
		Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan			
3	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	B	BB	BB

Sumber :Sumber dari BKKBN Perwakilan Provinsi Papua dan Juga Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Selatan.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	Rata - rata Anak per Keluarga	4 orang	4 Orang	100%	Keberhasilan indikator ini dikarenakan didukung oleh Tim Pendamping Keluarga yang ada di setiap Kampung.	Lebih sering lagi sosialisasi tentang jarak angka kelahiran per keluarga
		Rasio Akseptor KB	0,6 %	0,5%	83,33%	Keberhasilan ini dikarenakan sudah mulainya kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi	Dukungan agar masyarakat memiliki konsistensi kesadaran yang tinggi.
		Cakupan Peserta KB	56,89 %	51%	89,64%	Cakupan penggunaan alat kontrasepsi mulai meluas di kalangan masyarakat.	Lebih sering diadakan penyuluhan tentang KB
		Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	8,54%	0,26%	3,04%	Keberhasilan dikarenakan sudah adanya bantuan dari anggaran Otsus untuk peningkatan usaha kecil masyarakat Asli Papua.	Lebih sering pendampingan kelompok untuk peningkatan pendapatan
2	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	35,30%	0,29%	0,82%	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sudah semakin baik	Harus sering adanya edukasi kepada perempuan khususnya OAP
		Rasio KDRT	20,57%	0,1%	0,48%	Kurangnya kesadaran tentang pelanggaran KDRT	Lebih sering diadakan penyuluhan KDRT

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Pekerja Usia Anak-anak	5,14%	0,17%	3,30%	Masih kurangnya kesadaran anak tentang pendidikan	Lebih sering lagi diadakan pendekatan tentang pentingnya pendidikan bagi anak -anak
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,57%	0,24%	0,43%	Kurangnya Lapangan Kerja khususny bagi perempuan Asmat	Adanya pembukaan lapangan kerja khususnya bagi perempuan Asmat
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	18,14%	0,2%	1,1%	Pelaporan kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah baus tapi harus di tingkatkan kembali	Lebih sering diadakan penyuluhan tentang bahaya tindak kekerasan bagi anak dan perempuan
3	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	B	B	100%	Keberhasilan Evaluasi akuntabilitas harusn semakin baik guna perbakan pemerintahan yang akuntabel	Lebih sering lagi adanya pelatihan tentang akuntabilisasi pelaporan.

Sumber : Sumber dari Seksi Pengendalian Penduduk dan juga Bidang Pada DPPKB

Uraian penjelasan tabel :

Keberhasilan Indikator tergantung pada penambahan anggaran dan juga kesadaran masyarakat. Namun terkadang ada kurangnya kesadaran masyarakat yang membuat kurang berhasilnya indikator tersebut walaupun sudah didukung oleh anggaran yang mencukupi.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	56,89 %	10,40%	18,28	5.476.197.655	5.394.604.980	98.51	81,592,675
2	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18,14%	2,26%	12,45	191.935.780	184.125.531	95.93	7,810,249
3	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	B	B	100	4.982.444.505	4.367.520.572	87.66	614,923,933

Sumber : Sumber dari realisasi keuangan dan juga dari bidang pelaksana kegiatan

Uraian penjelasan tabel:

Pelaksanaan Kegiatan sudah mencakup sasaran dan target namun tidak semua lokus tercukupi mengingat keterbatasan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	Rata - rata Anak per Keluarga	100%	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rata - rata Anak per Keluarga	100%	Menunjang	Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut
		Rasio Akseptor KB	83,33%	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaringnya	Rasio Akseptor KB	83,33%	Menunjang	Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut
		Cakupan Peserta KB	89,64%	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Peserta KB	89,64%	Menunjang	Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut
		Tingkat kemiskinan (Pra	3,04%	Penyediaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanaan Kader Ketahanan dan	Tingkat kemiskinan (Pra	3,04%	Menunjang	Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		sejahtera + Sejahtera)		Kesejahteraan Keluarga (BKR,BKB,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera)	sejahtera + Sejahtera)			
2	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	0,82%	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	0,82%	Menunjang	Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut
		Rasio KDRT	0,48%	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Rasio KDRT	0,48%	Menunjang	Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut
		Persentase Pekerja Usia Anak-anak	3,30%	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten kota	Persentase Pekerja Usia Anak-anak	3,30%	Menunjang	Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0,43%	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0,43%	Menunjang	Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut
		Penyelesaian Pengaduan	1,1%	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	Penyelesaian Pengaduan	1,1%	Menunjang	Sudah Sesuai Out Put dari Kegiatan Tersebut

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan		kewenangan kabupaten/kota	Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan			
3	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	100%	Menunjang	Sudah Sesuai Output dari Kegiatan Tersebut

Sumber : Dari Realisasi Keuangan dan Bidang pengampu kegiatan

Uraian penjelasan tabel :

Indikator dari masing –masing kegiatan sudah sesuai untuk mengukur apakah kegiatan tersebut sudah berhasil atau pun belum.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Belanja Anggaran

No	Jenis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasional	14.188.241.719	13.403.986.634
	a. Belanja Pegawai	4.047.028.772	3.686.308.318
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.141.212.947	9.717.678.316
2	Belanja Modal	516.580.000	516.199.585

Tabel 3.3
Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Strategis Sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 10 Tahun 2025 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB) Tahun 2024

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)		Program Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	Rata - rata Anak per Keluarga	100%		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
					Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota			
					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	330.268.000	328.295.607	99.40
		Rasio Akseptor KB	83,33% 8		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
					Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota			
					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaringnya	15.406.000	15.387.200	99.88
		Cakupan Peserta KB	89,64%		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
					Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota			
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	105.990.000	87.586.594	82.64
		Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	3,04%		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
					Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan			

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)		Program Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
					keluarga			
					Penyediaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanaan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR,BKB,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera)	1.479.012.391	1.476.894.787	99.86
2	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	0,82%		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
					Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota			
					Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	191.935.780	184.125.531	95.93
		Rasio KDRT	0,48%		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
					Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota			
					Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	191.935.780	184.125.531	95.93
		Persentase Pekerja Usia Anak-anak	3,30%		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten kota	142.675.000	142.625.992	99.97
		Partisipasi Angkatan	0,43%		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)		Program Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Kerja Perempuan			Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota			
					Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	191.935.780	184.125.531	95.93
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	1,1%		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
					Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota			
					Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	191.935.780	184.125.531	95.93
3	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	100		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
					Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.496.120	26.480.238	99.94

Tabel 3.4
Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Output				Nilai Capaian Program/ Kegiatan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.982.444.505	4.367.520.572	87.66					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.496.120	26.480.238	99.94					
	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.496.120	26.480.238	99.94	Laporan	1	1	100	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.072.328.772	3.711.551.237	91.14					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.047.028.772	3.686.308.318	91.09	Orang	30	30	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.300.000	25.242.919	99.77	Laporan	1	1	100	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.069.007	127.854.007	92.60					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.206.000	21.535.000	88.97	Paket	20	20	100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.144.007	61.144.007	100	Paket	50	50	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.719.000	45.175.000	85.69	Laporan	1	1	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Output				Nilai Capaian Program/ Kegiatan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.548.606	490.985.000	66.84					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	100	Laporan	1	1	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.048.606	32.195.000	82.45	Laporan	1	1	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	691.000.000	454.290.000	65.74	Orang	26	26	100	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.000.000	10.650.000	96.82					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	11.000.000	10.650.000	96.82	Unit	20	20	100	100
6	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	191.935.780	184.125.531	95.93					
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	191.935.7808	184.125.531	95.93					
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	191.935.780	184.125.531	95.93	Orang	150	150	100	100
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	340.672.918	340.422.323	99.93					
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142.675.000	142.625.992	99.97					
	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten kota	142.675.000	142.625.992	99.97	Orang	100	100	100	100
8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak	197.997.918	197.796.331	99.90					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Output				Nilai Capaian Program/ Kegiatan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Peningkatan Kapasitas Penyedia Sumber daya Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah/Kota	197.997.918	197.796.331	99.90	Layanan	10	10	100	100
9	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	330.268.000	328.295.607	99.40					
	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	330.268.000	328.295.607	99.40					
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	330.268.000	328.295.607	99.40	Laporan	1	1	100	100
10	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.476.197.655	5.394.604.980	98.51					
	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.928.230.655	1.868.123.671	96.88					
	Advokasi Program KKBPK,Kepada SteakHolder,dan Mitra Kerja	195.282.000	169.233.829	86.66	Laporan	1	1	100	100
	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruangan	100.000.000	98.747.208	98.75	Laporan	1	1		
	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melaluia rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes), dan mini lokakarya (minilok)	363.030.241	361.071.526	99.46	Laporan	23	23	100	100
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	126.411.000	118.781.837	93.96	Unit	3	3	100	100
	Pengendalian Program KKBPK	1.143.507.414	1.120.289.271	97.97	Laporan	1	1	100	100
11	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	662.975.000	662.920.478	99.99					
	Penggerakan Kader Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	662.975.000	662.920.478	99.99	Laporan	1	1	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Output				Nilai Capaian Program/ Kegiatan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
12	Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota	2.021.348.000	2.001.945.564	99.04					
	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	1.899.952.000	1.898.971.770	99.95	Laporan	1	1	100	100
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	105.990.000	87.586.594	82.64	Orang	30	30	100	100
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaringnya	15.406.000	15.387.200	99.88	Orang	30	30	100	100
13	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	863.644.000	861.615.267	99.77					
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.762.000	3.743.800	99.52	Laporan	1	1	100	100
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat (DASHAT) dikampung Keluarga Berkualitas	562.625.000	561.041.680	99.72	Laporan	1	1	100	100
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana dikampung Berkualitas	297.257.000	296.829.787	99.86	Laporan	1	1	100	100
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.383.302.861	3.248.566.497	96.02					
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1.792.102.861	1.789.966.497	99.88					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Output				Nilai Capaian Program/ Kegiatan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Pengadaan Saranan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi /UPKKS)	313.080.470	313.071.710	100.00	Unit	25	25	100	100
	Penyediaan Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanaan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR,BKB,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera)	1.479.012.391	1.476.894.787	99.86	Kelompok	10	10	100	100
15	Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembngunan Keluarga Melalui Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	1.591.200.000	1.458.600.000	91.67					
	Pemantauan Data Beresiko Stunting	663.000.000	585.000.000	88.24	Orang	663	585	88,24	88,24
	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	928.000.000	873.600.000	94.14	Orang	663	624	94,14	94,14

Uraian penjelasan tabel:

Program ,kegiatan dan sub kegiatan sudah terlaksananya semua dan mencapai realisasi rata-rata hampr 100% dan juga capaian Output juga mendekati 100%, hal ini terjadi memank jadwal sudah sesuai dengan perencanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan. Selain itu juga dinas pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Memang mempunyai 2 urusan diantaranya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki 3 sasaran strategis dengan 3 sasaran strategis tercapai Semua.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah, Masih rendahnya kesadaran dan minat masyarakat untuk mengikuti program KB, Masih kurangnya tenaga penyuluh KB di setiap Distrik dan Kampung, Masih rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan di Asmat, dan Masih Adanya ancaman tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi langkah perbaikan 1.
2. Rekomendasi langkah perbaikan 2.
3. Rekomendasi langkah perbaikan 3.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

MENGETAHUI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN
ASMAT

MARGARETHA WABISER, SE
PEMBINA
NIP. 19780604 200502 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat: Jl Frans Kaisiepo Agats Telp/Fax: (0902 32191) Kode Pos: 99777

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN ASMAT
NOMOR : 050/05/DPPKB/I/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengukuran Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat yang berorientasi pada hasil (outcome);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M. Umum PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025);
13. Peraturan Bupati Asmat Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat;
14. Peraturan Bupati Asmat Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Asmat Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 15 Januari 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KB


MARGARETHA WABISER, SE
PEMBINA
Nip. 19780604 200502 2 004

Lampiran Keputusan Kepala DPPKB
 Nomor : 050/05/DPPKB/I/2024
 Tanggal : 15 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk seluruh Masyarakat	Rata-rata Anak per Keluarga	Jumlah Anak yang dilahirkan per Keluarga	Aplikasi Sistim Informasi Keluarga (SIGA)	Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Rasio Akseptor KB	Pengukuran kuantitatif dari jumlah individu atau pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi atau keluarga berencana (KB)	Aplikasi Sistim Informasi Keluarga (SIGA)	Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah peserta KB aktif dari setiap pasangan usia subur	Aplikasi Sistim Informasi Keluarga (SIGA)	Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Tingkat Kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Bidang Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Bidang Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera
Meningkatkan Pengarusutamaan Gender	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Peningkatan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah	Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Bidang Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera
		Rasio KDRT	Jumlah KDRT yang dilaporkan dalam	Aplikasi Simponi Kementrian	Bidang Perlindungan

			periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga	Perlindungan Perempuan dan Anak	Perempuan dan Anak
		Persentase pekerja Usia anak -anak	Peningkatan pekerja anak usia 5-14 tahun dan jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
		Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Prosedur penanganan pengaduan langsung dan tidak langsung	Aplikasi Simponi Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang professional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	Penilaian Inspektorat atas laporan Kinerja OPD	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 15 Januari 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KB



MARGARETHA WABISER, SE
PEMBINA
NIP. 19780604 200502 2 004



**PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN ASMAT
KEPALA DINAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARGARETHA WABISER, SE**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ELISA KAMBU, S. Sos**
Jabatan : **Bupati Asmat**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
ELISA KAMBU, S.Sos

Agats, 15 Januari 2024


Pihak Pertama
MARGARETHA WABISER, SE
NIP. 19780604 200502 2 004

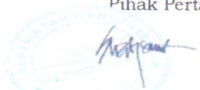
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	1. Rata - rata Anak per Keluarga	4 orang
		2. Rasio Akseptor KB	0,6 %
		3. Cakupan Peserta KB	56,89 %
		4. Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	8,54%
2.	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5. Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	35,30%
		6. Rasio KDRT	20,57%
		7. Persentase Pekerja Usia Anak-anak	5,14%
		8. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,57%
3.	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	9. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	18,14%
		10. Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,027,363,831	APBD
2. Program Perlindungan Perempuan	191,935,780	APBD
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	197,997,918	APBD
4. Program Pengendalian Penduduk	160,200,000	APBD
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5,556,960,420	APBD
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3,270,721,250	APBD
TOTAL	14,405,179,199	APBD

Agats, 15 Januari 2024


ELISA KAMBU, S.Sos

Pihak Pertama

MARCELLA WABISER, SE
NIP. 19780604 200302 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN ASMAT
KEPALA DINAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARGARETHA WABISER, SE**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ELISA KAMBU, S. Sos**
Jabatan : **Bupati Asmat**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


ELISA KAMBU, S.Sos

Agats, 20 September 2024

Pihak Pertama

MARGARETHA WABISER, SE
NIP. 19780604 200502 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	1. Rata - rata Anak per Keluarga	4 orang
		2. Rasio Akseptor KB	0,6 %
		3. Cakupan Peserta KB	56,89 %
		4. Tingkat kemiskinan (Pra sejahtera + Sejahtera)	8,54%
2.	Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5. Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	35,30%
		6. Rasio KDRT	20,57%
		7. Persentase Pekerja Usia Anak-anak	5,14%
		8. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,57%
3.	Peningkatan Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada pelayanan Prima	9. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	18,14%
		10. Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,982,444,505	APBD
2. Program Perlindungan Perempuan	191,935,780	APBD
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	340,672,918	APBD
4. Program Pengendalian Penduduk	330,268,000	APBD
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5,476,197,655	APBD
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3,383,302,861	APBD
TOTAL	14,704,821,719	APBD

Agats, 20 September 2024


Pihak Kedua
ELISA KAMBU, S.Sos


Pihak Pertama
MAPUDHA WABISER, SE
 NIP. 19780604 200302 2 004

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Kinerja	Rp. juta	Kinerja	Rp. juta	Kinerja	Rp. juta	Kinerja	Rp. juta	Kinerja	Rp. juta
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.693.321.639		6.615.000.000		6.346.000.000		6.007.000.000		7.296.875.000		
2.08.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Terdapatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD	Terdapatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
2.08.01.2.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKD-SKPD	Terdapatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RKD-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah				4.558.680.194		4.630.000.000		4.895.000.000		5.196.000.000		5.360.875.000
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang / ASN	35 Orang / ASN	4.539.290.194	35 Orang / ASN	4.600.000.000	35 Orang / ASN	4.880.000.000	35 Orang / ASN	5.170.000.000	35 Orang / ASN	5.350.875.000
2.08.01.2.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terdapatnya koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2 Laporan	19.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	35.000.000
2.08.01.2.03	Administrasi Umum Pemerintah Daerah				428.199.231		408.000.000		585.000.000		698.000.000		
2.08.01.2.03.01	Penyediaan pendirian rumah tinggal	Terdapatnya Penyediaan pendirian rumah tinggal	5 Tahun	Terdapatnya pendirian rumah tinggal	46.900.128	Terdapatnya pendirian rumah tinggal	70.000.000	Terdapatnya pendirian rumah tinggal	70.000.000	Terdapatnya pendirian rumah tinggal	80.000.000	Terdapatnya pendirian rumah tinggal	82.000.000
2.08.01.2.03.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terdapatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK, maket dan minuman rapat dan BBM 5 Tahun	Terdapatnya ATK, maket dan minuman rapat serta BBM	87.504.105	Terdapatnya ATK, maket dan minuman rapat serta BBM	80.000.000	Terdapatnya ATK, maket dan minuman rapat serta BBM	80.000.000	Terdapatnya ATK, maket dan minuman rapat serta BBM	90.000.000	Terdapatnya ATK, maket dan minuman rapat serta BBM	83.000.000

[illegible]

2.08.01.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pertemuan kebijakan pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pertemuan kebijakan pelaksanaan PUG	Agats Jayapura, Semarang			Agats Jayapura, Semarang	135.000.000				Agats Jayapura, Semarang	135.000.000	
2.08.01.2.01.03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Agats Jayapura, Semarang			Agats Jayapura, Semarang	135.000.000				Agats Jayapura, Semarang	135.000.000	
2.08.01.2.01.04	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Agats Jayapura, Semarang			Agats Jayapura, Semarang	135.000.000				Agats Jayapura, Semarang	135.000.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota							150.000.000		150.000.000		150.000.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum sosial dan ekonomi	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum sosial dan ekonomi	23 Distrik			5 Distrik	-	Distrik Agats	150.000.000	Distrik Asy	150.000.000	Distrik Sami Enma	150.000.000
2.08.02.2.03	Pengujian dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota				512.116.000		200.000.000		500.000.000		450.000.000		450.000.000
2.08.02.2.03.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Organisasi	17 Organisasi	218.612.000	5 Distrik	-	8 Distrik	200.000.000	5 Distrik	150.000.000	5 Distrik	150.000.000
2.08.02.2.03.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	23 Distrik	3 Distrik	253.504.000	8 Distrik	100.000.000	5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	200.000.000	3 Distrik	200.000.000
2.08.02.2.03.03	Pengembangan komunikasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya Pengembangan komunikasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	23 Distrik			5 Distrik	100.000.000	5 Distrik	100.000.000	5 Distrik	100.000.000	5 Distrik	100.000.000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				679.086.425		528.077.349		1.100.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000
2.08.04.2.01	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota				419.532.425		200.000.000		400.000.000		600.000.000		600.000.000
2.08.04.2.01.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan hak anak di tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan hak anak di tingkat daerah kabupaten/kota	23 Distrik					7 Distrik	200.000.000	7 Distrik	200.000.000	7 Distrik	200.000.000
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan komunikasi informasi edukasi dan keluarga gender dan perlingan bagi keluarga kewenangan/kota	Terlaksananya Pelaksanaan komunikasi informasi edukasi dan keluarga gender dan perlingan bagi keluarga kewenangan/kota	23 Distrik							11 Distrik	200.000.000	11 Distrik	200.000.000
2.08.04.2.01.03	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	23 Distrik	6 Distrik	419.532.425	5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	200.000.000

2.08.04.2.02	Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah				253.504.000		628.077.362		600.000.000		600.000.000		600.000.000
2.08.04.2.02.01	Adaptasi kebijakan dan pendampingan peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Adaptasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	23 Distrik			Distrik Agats	200.000.000	4 Distrik	200.000.000	5 Distrik	250.000.000	5 Distrik	200.000.000
2.08.04.2.02.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kapasitas keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kapasitas keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota	23 Distrik	3 Distrik	253.504.000	5 Distrik	128.077.362	5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	250.000.000	5 Distrik	200.000.000
2.08.04.2.02.03	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	23 Distrik			6 Distrik	300.000.000	5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	200.000.000
2.08.04.2.03	Penyedia Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota						100.000.000		100.000.000		300.000.000		300.000.000
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan penyedia layanan kompromis bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pelaksanaan penyedia layanan kompromis bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	23 Distrik			5 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	8 Distrik	300.000.000	8 Distrik	300.000.000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								200.000.000		200.000.000		200.000.000
2.08.05.2.01	Pengumpulan pengolahan analisa dan penyajian dan gender dan anak dalam kelenbagan data di tingkat daerah kabupaten/kota								200.000.000		200.000.000		200.000.000
2.08.05.2.01.01	Penyedia Data Gender dan anak di kelenbagan kabupaten/kota	Terlaksananya Penyedia Data Gender dan anak di kelenbagan kabupaten/kota	23 Distrik					Kabupaten Asmat	100.000.000	Kabupaten Asmat	100.000.000	Kabupaten Asmat	100.000.000
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelenbagan data di kelenbagan kabupaten/kota	Terlaksananya Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelenbagan data di kelenbagan kabupaten/kota	23 Distrik					Kabupaten Asmat	100.000.000	Kabupaten Asmat	100.000.000	Kabupaten Asmat	100.000.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				601.310.000		950.000.000		700.000.000		600.000.000		600.000.000
2.08.03.2.01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan tingkat daerah kabupaten/kota				372.100.000		700.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	23 Distrik	17 Distrik	372.100.000	5 Distrik dan 7 kampung	350.000.000	7 Distrik	200.000.000	7 Distrik	200.000.000	7 Distrik	200.000.000

2.08.03.2.01.02	Alokasi kegiatan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kawanan kabupaten/kota	Terlaksananya Alokasi Kegiatan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kawanan kabupaten/kota	21 Dink			5 Dink dan 5 kampung	150.000.000	7 Dink	200.000.000	7 Dink	200.000.000	7 Dink	200.000.000	
2.08.03.2.02	Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kawanan kabupaten/kota				110.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
2.08.03.2.02.01	Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kawanan kabupaten/kota	Tersedianya Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kawanan kabupaten/kota	21 Dink	11 Dink	150.000.000	3 Dink	100.000.000	1 Dink	100.000.000	3 Dink	150.000.000	1 Dink	100.000.000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota				75.210.000		100.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000	
2.08.03.2.03.01	Alokasi kegiatan dan pendampingan penyedia sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kawanan kabupaten/kota	Terlaksananya Alokasi kegiatan dan pendampingan penyedia sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kawanan kabupaten/kota	21 Dink	DPKB	79.210.000			7 Dink	200.000.000					
2.08.03.2.03.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kawanan kabupaten/kota	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kawanan kabupaten/kota	21 Dink			5 Dink dan 5 kampung	150.000.000			5 Dink dan 5 kampung	150.000.000	5 Dink	100.000.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						425.200.000		350.000.000		150.000.000		700.000.000	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nongopemerintah dan dunia usaha kawanan kabupaten/kota						250.000.000		150.000.000				350.000.000	
2.08.06.2.01.01	Alokasi kegiatan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah/nongopemerintah/media dan (PHA) dunia usaha kawanan kabupaten/kota	Terlaksananya Alokasi kegiatan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah/nongopemerintah/medial dan (PHA) dunia usaha kawanan kabupaten/kota	21 Dink			7 Dink dan 7 kampung	100.000.000					7 Dink	300.000.000	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan hak anak kawanan kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan hak anak kawanan kabupaten/kota	21 Dink			5 Dink dan 5 kampung	150.000.000	5 Dink	150.000.000			5 Dink	150.000.000	
2.08.04.2.02	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak kawanan kabupaten/kota						175.200.000		200.000.000		150.000.000		350.000.000	
2.08.04.2.02.03	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	21 Dink			8 Dink dan 8 kampung	175.200.000	5 Dink	200.000.000	5 Dink	150.000.000	5 Dink	150.000.000	

2.08.04.2.02.04	Pengutan jejaring yang antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terkabarnya Pengutan jejaring yang antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	23 Distrik							5 Distrik	200.000.000		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				285.620.000	406.100.000		980.000.000		780.000.000		780.000.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak tingkat daerah kabupaten/kota				285.620.000	336.100.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000	
2.08.07.2.01.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Terkabarnya Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	23 Distrik	11 Distrik	285.620.000	5 Distrik dan 5 kampung	250.100.000	5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	250.000.000	5 Distrik	200.000.000
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Terkabarnya Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	23 Distrik			Agats, Jayapura, Jakarta	80.000.000	Agats, Jayapura, Jakarta	80.000.000	Agats, Jayapura, Jakarta	80.000.000	Agats, Jayapura, Jakarta	80.000.000
2.08.07.2.02	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota							400.000.000		300.000.000		300.000.000	
2.08.07.2.02.03	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Terkabarnya Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	23 Distrik				7 Distrik	200.000.000	7 Distrik	200.000.000	7 Distrik	200.000.000	
2.08.07.2.02.04	Pengutan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Terkabarnya Pengutan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	23 Distrik				5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	100.000.000	5 Distrik	100.000.000	
2.08.07.2.03	Pengutan dan pendampingan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota					70.000.000		300.000.000		200.000.000		200.000.000	
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Terkabarnya Koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	23 Distrik			Agats, Jayapura, Jakarta	70.000.000	Agats	300.000.000	Atby	200.000.000	Alat	200.000.000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				155.000.000	2.055.000.000		2.065.000.000		1.805.000.000		1.605.000.000	

2.14.02.2.01	Pemaduan dan sinkronisasi Kabupaten pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka, pengendalian kualitas penduduk				111.000.000		1.855.000.000		1.695.000.000		1.106.000.000		1.855.000.000
2.14.02.2.01.01	Penyusunan kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga program KBPK	Terkaitannya Penyusunan kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga program KBPK	21 Distrik			Jayapura, Ikatara, Agats, Akat, Aky, Ays, Smit, Nechama, Sawa Lima, Sura, Nura	550.000.000	8 Distrik	550.000.000	8 Distrik	550.000.000	8 Distrik	550.000.000
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan pemeliharaan grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/kota	Terkaitannya Penyusunan dan pemeliharaan grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/kota	23 Distrik			Kabupaten Armat, Jayapura, Ikatara	250.000.000	Kabupaten Armat, Jayapura, Ikatara	250.000.000	Kabupaten Armat, Jayapura, Ikatara	250.000.000	Kabupaten Armat, Jayapura, Ikatara	250.000.000
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan survey/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	Terkaitannya Pelaksanaan survey/pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	23 Distrik	7 Distrik	155.000.000	7 Distrik	155.000.000	7 Distrik	155.000.000	5 Distrik	250.000.000	7 Distrik	155.000.000
2.14.02.2.02	Pemetaan perkiraan penduduk cakupan daerah kabupaten/kota						1.000.000.000		1.000.000.000		795.000.000		930.000.000
2.14.02.2.02.03	Penyusunan profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Terkaitannya Penyusunan profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	23 Distrik			Kabupaten Armat, Jayapura, Ikatara	250.000.000	Kabupaten Armat, Jayapura, Ikatara	250.000.000				
2.14.02.2.02.08	Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integritas program KBPK di sektor lain	Terkaitannya Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integritas program KBPK di sektor lain	19 Distrik dan 19 kampung KB			5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	200.000.000	5 Distrik	200.000.000	4 Distrik	200.000.000
2.14.02.2.02.13	Pengalasan dan pelayanan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Terkaitannya Pengalasan dan pelayanan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	23 Distrik			17 puskesmas	250.000.000	17 puskesmas	250.000.000	17 puskesmas	250.000.000	17 puskesmas	100.000.000
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelayanan program KBPK	Terkaitannya Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelayanan program KBPK	23 Distrik			5 Distrik	250.000.000	5 Distrik	250.000.000	5 Distrik	250.000.000	5 Distrik	250.000.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.036.720.000		1.860.000.000		1.578.000.000		1.260.000.000		1.860.000.000
2.14.03.2.01	Pelaksanaan advokasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal				26.670.000		500.000.000		600.000.000		500.000.000		300.000.000
2.14.03.2.01.02	Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program KBPK sesuai kearifan budaya lokal	Terkaitannya Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program KBPK sesuai kearifan budaya lokal	23 Distrik	Distrik Agats	26.670.000	3 Distrik	150.000.000	3 Distrik	150.000.000	3 Distrik	150.000.000	3 Distrik	150.000.000
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE program KBPK melalui Media Masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Terkaitannya Promosi dan KIE program KBPK melalui Media Masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	23 Distrik			Armat, Ikatara (Harganai)	150.000.000	Armat, Ikatara (Harganai)	150.000.000	Armat, Ikatara (Harganai)	150.000.000	Armat, Ikatara (Harganai)	150.000.000
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KBPK melalui rapat koordinasi (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokal	Terkaitannya Pelaksanaan mekanisme operasional program KBPK melalui rapat koordinasi (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokal	23 Distrik			8 Distrik dan 2 Kampung	200.000.000	8 Distrik	300.000.000	8 Distrik	200.000.000	8 Distrik	150.000.000

2.14.03.2.02	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				2.037.848.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan MP dan Program KB/PK di Unit layanan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan MP dan Program KB/PK di Unit layanan oleh PKB/PLKB	23 Distrik	23 Distrik	597.040.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Terlaksananya Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Penyuluh KB	Penyuluh KB	1.440.000.000			Penyuluh KB	100.000.000	Penyuluh KB	100.000.000	Penyuluh KB	100.000.000	
2.14.03.2.02.03	Pengutan pelaksanaan penyuluhan/penggerakan pelayanan dan pemasangan program KB/PK untuk petugas keluarga berencana/penyuluhan lapangan keluarga	Terlaksananya Pengutan pelaksanaan penyuluhan/penggerakan pelayanan dan pemasangan program KB/PK untuk petugas keluarga berencana/penyuluhan lapangan keluarga	23 Distrik			3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota				2.773.014.000		300.000.000		675.000.000		460.000.000		460.000.000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana pendukung pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana pendukung pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	23 Distrik	19 Distrik	177.940.000	11 Distrik	100.000.000	11 Distrik	300.000.000	11 Distrik	100.000.000	11 Distrik	100.000.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	23 Distrik	17 Distrik	1.507.114.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	Terlaksananya Promosi dan konseling kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	23 Distrik	3 Distrik	570.890.000	3 Distrik	160.000.000	5 Distrik	270.000.000	5 Distrik	160.000.000	5 Distrik	160.000.000	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Terlaksananya Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	23 Distrik	12 Distrik	640.160.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	3 Distrik	100.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (K3)								90.096.231		309.401.040		190.000.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga						190.000.000		90.096.231		309.401.040		190.000.000	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan pelatihan teknis pengkajian ketahanan dan kesejahteraan keluarga (SKL, BOK, BK, PPKS, PK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPK)	Terlaksananya Orientasi dan pelatihan teknis pengkajian ketahanan dan kesejahteraan keluarga (SKL, BOK, BK, PPKS, PK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPK)	23 Distrik			Agus, SMP, Persiapan Mabit, SMP Yopia, SMP Negeri 2 Agats, SMK Kaye, SMA Yan Smt, SMA/PPg Agats	190.000.000	8 Distrik	90.096.231	5 Distrik	309.401.040	5 Distrik	190.000.000	



SERTIFIKAT



APRESIASI

DIBERIKAN KE

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ASMAT

ATAS PARTISIPASI SEBAGAI PESERTA PADA KEGIATAN PAMERAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2024 YANG MENGUSUNG TEMA "TUMBUH, MAJU MENUJU KEMANDIRIAN YANG BERMARTABAT MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045" PADA TANGGAL 30 AGUSTUS S/D 01 SEPTEMBER 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

BUPATI



ELISA KAMBU, S.SOS



WAKIL BUPATI

THOMAS EPPE SAFANPO, ST.

